

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Oleh : Salasiah**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

### **ABSTRACT**

*The results of the research indicate that (1) the implementation of PUG policy seen from the RPJMD prioritizes the improvement of women's capacity and role in development, especially the participation of women in the government, private sector, labor force and improvement of gender development index. While the PUG policy contained in BPPKB strategic plan shows that the enactment of strategies such as increasing participation of women in private institutions and government.*

*There is a description of the activities that run optimally such as the Exhibition of Women's Works in the Field of Development in addition there are also activities that have not run optimally such as Building a Women Awakening Activity in Politics, this activity needs to be maximized again by BPPKB. (2) the factors influencing the implementation of policies such as environmental conditions indicate that the community is still less concerned with women's participation in public decisions and public policy.*

*Then in the inter-organizational relationship factor, the action plan of Gender Mainstreaming (PUG) in each Unit of Regional Work Unit is implemented in harmony so that requires cooperation between the SKPD and cross-sectoral involvement. Furthermore, the Resource factor shows that the quantity of women in BPPKB has more number than men. In addition, support in the form of equipment and equipment is sufficient and the characteristic factor of the implementing agency capability shows the commitment of BPPKB employees in socializing gender responsive development.*

---

*Keywords: Implementation, policy, PUG.*

## I. PENDAHULUAN

Perspektif gender marak diterapkan dalam program pembangunan pemerintah saat ini seiring terbukanya ruang demokrasi yang bermuara pada keadilan sosial. Perspektif gender pada awalnya diterapkan menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Melalui aturan tersebut diketahui bahwa tujuan PUG yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Strategi ini ditempuh guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan sosial yang selama ini bersifat androsentris, dapat dilihat sebagai ketimpangan struktural dalam perspektif gender (Susanti, 2000). Istilah gender mengacu pada makna sosial, budaya, dan biologis. Peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan kemajuan iptek (Putraningsih, 2006). konsep mengenai peran gender yang terstruktur di Indonesia dihubungkan dengan istilah “pengarusutamaan gender” sendiri merupakan adaptasi dari bahasa Inggris gender mainstreaming, dan dalam realitasnya terdapat kesalahpahaman serta konflik saat menjelaskan masalah bias gender atau stereotip peran gender. Ketidaksetaraan gender dan peran tradisional masing-masing gender telah benar-benar mengakar dalam pemikiran masyarakat Indonesia, dan budaya serta agama merupakan hambatan terbesar (Hermina, 2015).

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender ini mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Dimana Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan maupun laki-laki dalam rangka menjalankan peran-peran peran-peran sosialnya masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pelayanan lainnya. Sementara Kebutuhan strategis gender mengacu pada kebutuhan perempuan maupun laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan maupun laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian perandan tanggungjawab dalam pemerintahan.

Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Program pembangunan secara normatif seringkali dideklarasikan sebagai upaya melakukan perubahan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi masyarakat umum. Pembangunan, dipahami netral, dalam pengertian tidak memihak atau memberikan peluang yang sama pada kelompok tertentu untuk memperoleh manfaat. Pandangan ini tidak terlalu tepat karena sebenarnya pembangunan memberikan dampak yang berbeda, sesuai dengan tingkat seseorang atau kelompok yang mengakses hasil-hasil pembangunan. Dalam pengertian ini, pembangunan bersifat tidak netral atau merepresentasikan suatu kepentingan dominan, bahkan ideologi tertentu. (Muttaqin, 2010)

Oleh karena itu dapat dikatakan pembangunan dalam perspektif gender juga tidak bersifat netral. Program pembangunan yang sedemikian rupa didesain untuk mengakomodasi kepentingan publik, ternyata dalam praktiknya memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, pada titik tertentu, pembangunan yang sudah dianggap ideal mengakomodasi kepentingan umum dan memenuhi hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya justru semakin membuat kelompok perempuan terpuruk (Mosse, 2007).

Kesenjangan yang terjadi ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya suatu kondisi yang sama, seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Melalui pemahaman bahwa tanggung jawab, peran, fungsi, kesempatan, peluang dalam kehidupan sosial merupakan tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan serta mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang sektor diharapkan mampu meminalisasikan permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor kehidupan (Marince, 2013).

Seiring berjalannya waktu perspektif PUG mengalami kemajuan dari segi regulasi hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Pengarusutamaan Gender di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Kemudian Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Implementasi kebijakan PUG menarik untuk diteliti karena sejumlah hambatan dari penerapan kebijakan PUG di berbagai instansi di Daerah. Penelitian terdahulu tentang implementasi PUG dapat diidentifikasi dari penelitian Susiana (2015) yang melihat Keberhasilan implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di tingkat daerah pada era otonomi ini sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka penelitian ini perlu melihat aspek perkembangan kebijakan PUG yang diimplementasikan di Daerah namun secara khusus pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangatta.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kutai Timur mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi BPPKB. Sebelumnya, melalui Biro KAPP bagian Pemberdayaan Perempuan telah dilaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan, namun belum mampu menjawab isu pokok pemberdayaan perempuan, PUG, serta perlindungan perempuan dan anak karena tugas pokok dan fungsinya sangat terbatas.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Timur?
2. Bagaimana faktor-faktor Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Timur ?

## **III. METODE PENELITIAN**

Sugiyono (2011:333) mengemukakan bahwa analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2011:334)

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

#### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi misalnya observasi, wawancara yang

dikontrol berdasarkan kerangka teori dan konsep yang ada dalam tulisan ini serta diperkuat dengan gejala yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan mengetahui faktor-faktor Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Timur. Untuk penjelasan lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

## **1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Timur.**

Implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008). Merujuk pada penjelasan tersebut maka penelitian ini akan melihat sejumlah tindakan atau keputusan yang mengacu pada sejumlah indikator yang dapat digunakan melihat implementasi kebijakan PUG pada BPPKB kabupaten kutai timur diantaranya sebagai berikut.

### **1.1. Kebijakan PUG yang tertuang dalam RPJMD**

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur (RPJMD) 2016-2021 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena menyangkut Pembangunan Sumberdaya Manusia. Begitu pula dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selalu mengacu pada RPJMD dalam pelaksanaan seluruh aspek kegiatannya.

BPPKB Kabupaten Kutai Timur mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi BPPKB. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKB Kab. Kutai Timur terkait PUG dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 1.  
Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait PUG di Kabupaten Kutai Timur

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	14,%	14,05%	14,10%	14,15%	14,20%	14,25%
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Partisipasi angkatan kerja perempuan	35%	35,05%	35,10%	35,15%	35,20%	35,25%
Indeks Pembangunan Gender	75%	75,5%	75,10%	75,15%	75,20%	75,25%

Sumber BPPKB Kabupaten Kutai Timur, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat indikator yang melingkupi PUG di Kabupaten Kutai timur yang diantaranya yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yang ditargetkan mencapai 14,25 % pada tahun 2021, Partisipasi perempuan di lembaga swasta yang rata-rata tiap tahun yakni 90%, Partisipasi angkatan kerja perempuan yang ditargetkan pada tahun 2021 mencapai 35,25% dan indeks pembangunan gender mencapai 75,25%.

Sebelumnya pembangunan responsif gender telah dilaksanakan dalam berbagai program pemberdayaan perempuan, namun belum mampu menjawab isu pokok pemberdayaan perempuan khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG) karena tugas pokok dan fungsinya sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Perencanaan Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa :

“Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan hal ini karena keterbatasan tugas dan fungsi yang dilakukan BPPKB dan Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender menjadi prioritas untuk mengoptimal PUG di Kabupaten Kutai Timur”

(wawancara tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan terbatas pada tugas dan fungsi BPPKB serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender masih minim sehingga sosialisasi PUG ini perlu dioptimalkan oleh pemerintah khusus BPPKB kabupaten Kutai Timur.

Kemudian hasil wawancara dengan Staf. Bidang Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa :

“pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya perempuan yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan kehidupan manusia baik di dalam kehidupan keluarga maupun bagi lingkungan sekitarnya hal ini diperlukan guna Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Peran Perempuan dalam Pembangunan”  
(wawancara tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh gambaran bahwa hal penting yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait PUG yaitu peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan PUG yang dilihat dari RPJMD memprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan khususnya partisipasi perempuan pada sektor pemerintah, swasta, angkatan kerja serta peningkatan indeks pembangunan gender yang diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

## **1.2. Kebijakan PUG yang tertuang dalam Rencana Strategis**

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Friedrich dalam Wahab (2008:2). Adapun Kebijakan yang tertuang dalam dalam rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dicermati melalui tabel yang disajikan berikut.

Tabel. 2. Identifikasi Permasalahan PUG Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai

Capaian/ Kondisi Saat Ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Aspek Kajian
	Internal (Kewenang an SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak	Kurangnya penyuluhan dan seminar mengenai pengarusutamaan gender di setiap lapisan masyarakat		Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender	Kurangnya penyuluhan dan seminar mengenai pengarusutamaan gender di setiap lapisan masyarakat
Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Belum Optimalnya peran pemerintah terhadap peningkatan pemahaman perempuan dalam bidang pembangunan		Minimnya kesadaran perempuan untuk turut berperan aktif dalam pembangunan	Masih sulitnya melakukan koordinasi dengan stakeholder dan Instansi terkait tentang peningkatan IPG (Indeks Pembangunan Gender)
<b>Strategi</b>				
Rencana Strategi yang dilakukan terkait PUG di Kabupaten Kutai Timur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Komitmen Pemerintah Untuk Peningkatan Kualitas SDM</li> <li>2. Meningkatkan Peran Serta perempuan Di Lembaga Swasta dan Pemerintah</li> <li>3. Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di bidang politik baik di partai maupun di legislatif</li> <li>4. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang</li> <li>5. Peningkatan dukungan Masyarakat, Organisasi, Lembaga dalam Pemahaman Pengarusutamaan Gender</li> </ol>		

Sumber BPPKB Kabupaten Kutai Timur, 2018.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kurangnya penyuluhan dan seminar mengenai pengarusutamaan gender di setiap lapisan masyarakat mengakibatkan belum optimalnya pengarusutamaan gender disamping itu belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan disebabkan masih sulitnya melakukan koordinasi dengan stakeholder dan Instansi terkait tentang peningkatan IPG (Indeks Pembangunan Gender) untuk mengoptimalkan Pengarusutamaan gender (PUG) ini maka dilakukan strategi seperti mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM, meningkatkan peran serta perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di bidang politik baik di partai maupun di legislatif , meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang, dan peningkatan dukungan Masyarakat, Organisasi, Lembaga dalam Pemahaman Pengarusutamaan Gender.

### 1.3. Kebijakan PUG yang tertuang dalam dalam program kerja BPPKB

Pada penelitian ini terdapat dua program kerja yang menyetuh kebijakan Pengarusutamaan Gender yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Untuk uraian kegiatan dari Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3  
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam  
Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur

Uraian Kegiatan	Anggaran		Relisasi Anggaran		Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)	
Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	75.000.000		73.641.625,00		98,19	
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	150.000.000	15.000.000	149.066.000,00	15.000.000,00	99,38	100,00

Pembinaan Organisasi Perempuan		1.245.000.000		1.188.836.900,00		95,49
Membangun Kebangkitan Perempuan di Bidang Politik		235.000.000		195.715.250,00		83,28
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		50.000.000		45.152.000,00		90,30
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		50.000.000		49.994.000,00		99,99
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten		50.000.000		49.438.000,00		98,88

Sumber : BPPKB Kutai Timur 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sejumlah program dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan dari program Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yaitu bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan, pembinaan organisasi perempuan, membangun kebangkitan perempuan di bidang politik, peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta, peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dan sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten.

Kegiatan yang teralisasi 100% yaitu Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan sementara kegiatan yang paling rendah realisasi adalah kegiatan Membangun Kebangkitan Perempuan di Bidang Politik dapat dikatakan belum terealisasi secara optimal dengan persentasi 83,28%.

Selanjutnya untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.  
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Uraian Kegiatan	Anggaran		Relisasi Anggaran		Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)	
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	100.000.000		97.242.580,00		97,24	
Peringatan Hari Anak	100.000.000	75.000.000	95.868.500,00	73.544.830,00	95,87	98,06
Kegiatan Peringatan Hari Ibu	150.000.000	40.000.000	149.141.360,00	40.000.000,00	99,43	100,00
Upaya Pengurangan Angka Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga		45.000.000		44.896.000,00		99,77
Pemberdayaan Forum Anak	100.000.000	75.000.000	94.757.375,00	73.826.320,00	94,76	98,44
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sekretariat P2TP2A	74.500.000	75.000.000	70.261.006,00	70.487.000,00	94,31	93,98
Seleksi Tunas Muda Pemimpin Indonesia		20.000.000		19.549.600,00		97,75
Pembinaan Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan Menuju Kecamatan Layak Anak		87.360.000		85.397.600,00		97,75
Pengadaan Saprasi P2TP2A		40.000.000		37.611.500,00		94,03
Penanganan Kasus Korban Kekerasan		55.000.000		47.746.923,00		86,81
Pelatihan Tenaga Pendamping KDRT	100.000.000		93.940.000,00		93,94	
FDG Percepatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100.000.000		95.651.920,00		95,65	
Pembinaan dan Evaluasi Kab/Kota Pengembangan KLA dan Operasional Gugusan Tugas KLA Provinsi	100.000.000		98.870.600,00		98,87	
Sosialisasi P2TP2A dan KLA, melalui Baliho, Media Masa dan Lain-lain	100.000.000		92.066.000,00		92,07	
Advokasi/Fasilitas dan Pembinaan/Evaluasi Gugus Tugas Trafficking Kab/Kota dan Operasional Gugus Tugas Provinsi	100.000.000		88.649.925,00		88,65	
Pembentukan Taman Bermain Anak dan SD Ramah Anak	276.000.000		237.563.530		86,07	
Rapat Kerja Teknis KLA dan Penyusunan RAD Kabupaten Layak Anak	250.000.000		209.102.450,00		83,64	

Sumber : BPPKB Kabupaten Kutai Timur, 2018.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa terdapat kegiatan yang bersentuhan dengan Pegasusutamaan gender diantaranya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang teralisasi sebesar 97,24 %, Upaya Pengurangan Angka Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan persentasi 99,77. Selanjutnya Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan persentasi 93,98 %.

Dari penjelasan mengenai kedua program terkait PUG yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa program yang menjadi kegiatan di Kabupaten Kutai Timur khusus BPPKB diselenggarakan dengan cukup baik meskipun sejumlah kegiatan belum optimal namun secara persentasi menunjukkan angka yang relatif tinggi diantaranya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Upaya Pengurangan Angka Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pelayanan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sementara kegiatan yang perlu dimaksimalkan yaitu Membangun Kebangkitan Perempuan di Bidang Politik yang masih relatif rendah sementara kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan sudah teralisasi secara optimal.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan PUG yang dilihat dari RPJMD memprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan khususnya partisipasi perempuan pada sektor pemerintah, swasta, angkatan kerja serta peningkatan indeks pembangunan gender yang diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sementara kebijakan PUG yang tertuang dalam rencana strategis BPPKB menunjukkan bahwa diberlakukannya strategi seperti mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM, meningkatkan peran serta perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di bidang politik baik di partai maupun di legislatif, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang, dan peningkatan dukungan Masyarakat, Organisasi, Lembaga dalam Pemahaman Pengarusutamaan Gender.

Kemudian kebijakan PUG yang tertuang dalam program BPPKB menunjukkan dilakukannya beberapa program yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Terdapat uraian kegiatan yang berjalan optimal seperti Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan selain itu terdapat pula kegiatan yang belum berjalan

optimal seperti kegiatan Membangun Kebangkitan Perempuan di Bidang Politik, kegiatan ini perlu dimaksimalkan kembali oleh BPPKB Kabupaten Kutai Timur.

## **B. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Kutai Timur.**

Untuk mengetahui sejumlah faktor-faktor Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Kutai Timur maka penelitian ini mengacu pada sejumlah indikator yaitu Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumberdaya organisasi, dan Karakteristik kemampuan agen pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

### **1. Kondisi lingkungan**

Kondisi lingkungan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai timur. Untuk menelusuri indikator kondisi lingkungan ini maka dilakukan sejumlah wawancara dengan informan masyarakat IS, yang terlibat dalam kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan yang mengemukakan bahwa :

“kami rasa perlu pengarusutamaan gender untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan disamping itu partisipasi perempuan juga perlu diperhatikan saat ini partisipasi perempuan di Kabupaten masih kurang” (Hasil wawancara tanggal, 12 Maret 2018)

Selanjutnya informan masyarakat lainnya yaitu GA, mengemukakan pandangannya yang mengatakan bahwa :

“perempuan perlu mendapat perhatian dan dorongan melalui pelatihan yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan hal ini perlu karena perempuan saat ini kurang ambil bagian dalam keputusan-keputusan dan kebijakan publik laki-laki masih terlalu dominan” (Hasil wawancara tanggal, 15 Maret 2018)

Informan masyarakat lainnya yaitu AAF, mengemukakan pandangannya yang mengatakan bahwa :

“perempuan berpartisipasi dalam pembangunan sudah wajar terjadi saat ini namun belum kita lihat suara perempuan menonjol dalam

setiap penyelenggaraan pemerintahan” (Hasil wawancara tanggal, 12 Maret 2018)

Selanjutnya informan masyarakat lainnya yaitu HS, mengemukakan pandangannya yang mengatakan bahwa :

“perlunya motivasi buat perempuan agar terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah tentu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan partisipasi dalam pembangunan” (Hasil wawancara tanggal, 15 Maret 2018)

Berdasarkan serangkaian wawancara di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa kondisi lingkungan masyarakat masih kurang memperhatikan partisipasi perempuan dalam keputusan publik dan kebijakan publik. Perlu stimulus melalui serangkaian kegiatan yang dapat memotivasi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan guna menciptakan lingkungan yang responsif gender.

## **2. Hubungan Antar Organisasi**

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat beberapa program BPPKB yang bersentuhan dengan PUG salah satunya yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Untuk menelusuri hubungan antar organisasi dalam konteks PUG ini maka dilakukan wawancara dengan informan Pegawai Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa :

“rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga salah satu hal yang penting dalam keberhasilan PUG di daerah yakni adanya Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender yang selaras dengan kebijakan serta program pemerintah daerah hal inilah perlu koordinasi agar menjadi selaras dalam hal kebijakan” (Hasil wawancara tanggal, 18 Maret 2018)

Selain itu ditambahkan pula oleh informan Pegawai Sub Bidang Pemberdayaan Politik Ekonomi Sosial Budaya BPPKB Kabupaten Kutai Timur mengemukakan bahwa :

“dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) tidak dapat bekerja dan bergerak sendiri namun pemerintah perlu bermitra dengan

dengan lintas sektor baik pemerintah lintas SKPD, swasta, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan juga dunia usaha” (Hasil wawancara tanggal, 18 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa hubungan antar organisasi yang dimaksud yaitu rencana aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan selaras sehingga memerlukan kerjasama yang searah dalam pencapaian tujuan PUG yaitu pembangunan yang responsif gender disamping itu keterlibatan lintas sektor seperti perguruan tinggi, dunia usaha, swasta, dan organisasi kemasyarakatan turut andil dalam keberhasilan kebijakan PUG.

### 3. Sumberdaya organisasi

Pada faktor sumberdaya organisasi dimaksudkan untuk implementasi yang didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai timur.

Untuk menunjukkan sumber daya manusia (*human resources*) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5  
Jumlah Sumber Daya Manusia BPPKB Kutai Timur berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Eselon dan Gender

Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan								
No	Jabatan	S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Badan		1					1
2	Sekretaris		1					1
3	Kepala Bidang	2	2					4
4	Kasubbid/Kasubbag	4	7		-			11
5	Non Struktural		21	6	11			38
6	Non PNS		10	24	20			54
Berdasarkan Eselon dan Gender								
No	Gender	II	III	IV	Jumlah			
1	Perempuan	1	3	9	13			
2	Laki-laki		2	2	4			

Sumber : BPPKB Kutai Timur, 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM yang menduduki jabatan minimal berpendidikan S1 sementara pegawai non

struktural terdapat 11 yang berpendidikan SMA dan yang berstatus non PNS sebanyak 20 berpendidikan SMA dari 54 pegawai non PNS. Sementara dari sisi gender menunjukkan bahwa kuantitas perempuan yang ada di BPPKB memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 13 orang dan laki-laki hanya berjumlah 4 orang jika dilihat dari eselon yang dimiliki.

Selanjutnya sumberdaya non-manusia (*non human resources*) berupa Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas BPPKB. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 6

Perlengkapan dan Peralatan Kerja BPPKB Kabupaten Kutai Timur

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Komputer PC	22	
2	Komputer Notebook / Laptop	8	
3	Printer	14	
4	Meja Kerja	26	
5	Meja Komputer	4	
6	Sepeda Motor	6	
7	Tustel	1	
9	Lemari Arsip	4	
10	Dispenser	3	
11	Kursi Kerja	6	
12	Kursi rapat	20	
13	Mobil Dinas	3	
14	Facsimile	1	
15	Televisi	7	
16	Air Conditioning	32	
17	Handy Cam	1	

Sumber : BPPKB Kutai Timur, 2018.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sumberdaya berupa peralatan dan perlengkapan pada kantor BPPKB Kabupaten kutai timur sudah cukup memadai hal ini dapat dilihat dari 17 item peralatan dan perlengkapan yang

tersedia pada kantor BPPKB Kabupaten Kutai Timur yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada indikator Sumberdaya ini dapat diketahui bahwa pembagian SDM yang ada sudah menunjukkan adanya upaya pengarusutamaan gender hal ini dilihat dari kuantitas perempuan yang ada di BPPKB memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 13 orang dan laki-laki hanya berjumlah 4 orang jika dilihat dari eselon yang dimiliki. Selain itu dukungan berupa perlengkapan dan peralatan sudah cukup memadai dengan banyak item perlengkapan dan peralatan yang disiapkan untuk mendukung kinerja pegawai BPPKB Kabupaten Kutai Timur.

#### **4. Karakteristik Kemampuan Agen Pelaksana**

Pada indikator ini karakteristik kemampuan agen pelaksana yang dimaksud adalah mencakup hubungan kerja dalam pelaksanaan kebijakan PUG pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. Untuk menelusuri hubungan kerja pegawai BPPKB dalam pelaksanaan kebijakan PUG ini maka dilakukan wawancara dengan kepala Sub Bagian Perencanaan Program BPPKB yang mengemukakan bahwa :

“hal yang kami lihat adalah kemampuan dan keterampilan tenaga Penyuluh di Kecamatan dan daerah terpencil yang perlu ditingkatkan agar kebijakan ini tepat sasaran” (Hasil wawancara tanggal, 15 Maret 2018)

Kemudian hasil wawancara dengan informan Sub Bidang Pemberdayaan Politik Ekonomi Sosial Budaya BPPKB Kutai Timur mengemukakan bahwa :

“Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten dapat terlaksana dengan komitmen pegawai dalam rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, politik dan dunia usaha” (Hasil wawancara tanggal, 18 Maret 2018)

Selanjutnya ditambahkan oleh informan lain yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Kualitas Hidup Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa :

“pegawai dapat mengedukasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan PUG hal inilah yang dipahami pegawai BPPKB agar pembangunan responsif gender dapat terlaksana selain itu kerjasama dengan berbagai pihak merupakan faktor pendukung dari keberhasilan PUG”

(Hasil wawancara tanggal, 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai yang muncul dari hubungan kerja yang dilakukan yaitu adanya komitmen pegawai BPPKB dalam mensosialisasikan pembangunan yang responsif gender kepada masyarakat agar terbangun kualitas hidup yang baik bagi perempuan di Kabupaten Kutai Timur disamping itu adanya kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak menjadi faktor pendukung dalam mengsucceskan kebijakan PUG ini. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan penyuluh yang ada di daerah terpencil perlu dibekali lagi dengan pelatihan agar semakin terampil dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari keseluruhan indikator yang digambarkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumberdaya organisasi, dan karakteristik kemampuan agen pelaksana maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi lingkungan masyarakat masih kurang memperhatikan partisipasi perempuan dalam keputusan publik dan kebijakan publik. Perlu stimulus melalui serangkaian kegiatan yang dapat memotivasi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan guna menciptakan lingkungan yang responsif gender.

Kemudian faktor hubungan antar organisasi menunjukkan rencana aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan selaras sehingga memerlukan kerjasama yang searah dalam pencapaian tujuan PUG yaitu pembangunan yang responsif gender disamping itu keterlibatan lintas sektor seperti perguruan tinggi, dunia usaha, swasta, dan organisasi kemasyarakatan turut andil dalam keberhasilan kebijakan PUG.

Pada faktor Sumberdaya menunjukkan bahwa kuantitas perempuan yang ada di BPPKB memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 13 orang dan laki-laki hanya berjumlah 4 orang jika dilihat dari eselon yang dimiliki. Selain itu dukungan berupa perlengkapan dan peralatan sudah cukup memadai dengan banyak item perlengkapan dan peralatan yang disiapkan untuk mendukung kinerja pegawai BPPKB Kabupaten Kutai timur.

Pada faktor karakteristik kemampuan agen pelaksana menunjukkan adanya komitmen pegawai BPPKB dalam mensosialisasikan pembangunan yang responsif gender kepada masyarakat agar terbangun kualitas hidup yang baik bagi perempuan di Kabupaten Kutai Timur disamping itu adanya kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak menjadi faktor pendukung dalam mengsucceskan kebijakan PUG ini. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan penyuluh yang ada di daerah terpencil perlu dibekali lagi dengan berbagai pelatihan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, maka penulis menyimpulkan:

1. Implementasi kebijakan PUG yang dilihat dari RPJMD memprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan khususnya partisipasi perempuan pada sektor pemerintah, swasta, angkatan kerja serta peningkatan indeks pembangunan gender. Sementara kebijakan PUG yang tertuang dalam rencana strategis BPPKB menunjukkan bahwa diberlakukannya strategi seperti meningkatkan peran serta partisipasi perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah. Kemudian kebijakan PUG yang tertuang dalam program BPPKB menunjukkan dilakukannya beberapa program yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Terdapat uraian kegiatan yang berjalan optimal seperti Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan selain itu terdapat pula kegiatan yang belum berjalan optimal seperti kegiatan Membangun Kebangkitan Perempuan di Bidang Politik, kegiatan ini perlu dimaksimalkan kembali oleh BPPKB Kabupaten Kutai Timur.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti kondisi lingkungan menunjukkan masyarakat masih kurang memperhatikan partisipasi perempuan dalam keputusan publik dan kebijakan publik. Perlu Perlu stimulus melalui serangkaian kegiatan yang dapat memotivasi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan guna menciptakan lingkungan yang responsif gender. Kemudian faktor hubungan antar organisasi menunjukkan rencana aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan selaras sehingga memerlukan kerjasama antar SKPD dan keterlibatan lintas sektoral. Selanjutnya faktor Sumberdaya menunjukkan bahwa kuantitas perempuan yang ada di BPPKB memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selain itu dukungan berupa perlengkapan dan peralatan sudah cukup memadai dengan banyak item perlengkapan dan peralatan yang disiapkan untuk mendukung kinerja pegawai BPPKB Kabupaten Kutai timur dan faktor karakteristik kemampuan agen pelaksana menunjukkan adanya komitmen pegawai BPPKB dalam mensosialisasikan pembangunan yang responsif gender kemudian ditemukan adanya kemampuan koordinasi dan kerjasama

dengan berbagai pihak menjadi faktor pendukung dalam mengsucceskan kebijakan PUG ini.

## 5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan penyuluh yang ada di daerah terpencil perlu dibekali dengan berbagai pelatihan yang mendukung kompetensi mereka dalam memotivasi para perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan meskipun berada di daerah yang terpencil.
2. Implementasi Kebijakan PUG dalam bentuk program kerja perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama generasi muda agar dapat memperoleh pemahaman sejak dini tentang konsep PUG yang dapat memotivasi mereka meningkat kualitas hidup khususnya pada perempuan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Dunn, William H., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gaffar, Afan, (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hermina, Dina. 2015. *Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan*. jurnal.iain-antasari.ac.id. diakses 23 November 2016.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

- Islamy, Irfan, M. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Marince, Yesi. 2013. *Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Politik dan Komunikasi Volume 1 Nomor 5.
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muttaqin, Ahmad. 2010. *Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Studi Gender & Anak*. Vol.5 No.1.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)* . Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
- Putraningsih, Titik. 2006. *Pertunjukan Tari: Sebuah Kajian Perspektif Gender*. journal.uny.ac.id. diakses tanggal 23 November 2016.
- Ritzer , George and Douglas J. Goodman. 2003. *Modern Sociological Theory, 6th Edition*, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Sasongko, Sri Sundari. 2009. *Konsep dan Teori Gender*. Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender (PJJ-PUG).
- Soeparman, Surjadi, 2006, *Mengapa Gendermainstreaming Menjadi Aksi Nasional?*. Jurnal Perempuan, Edisi 50
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suryani, Elvira. 2010. *Sosialisasi Kesetaraan Gender Pada Pegawai Kantor Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi*. Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 2.
- Susanti, B.M. 2000. *Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender Dalam EKSPRESI Dari Bias lelaki menuju Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Jurnal ISI.
- Susiana, Sali. 2015. *Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : RTH
- Thoha, Miftah. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press